

CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERN

Rudi Zulfikar

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Rita Rosiana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ratu Ayu Fanisa Nariah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the role of Corporate Governance practice to internal control disclosure in Indonesian banking industry. Corporate Governance practice (CG) is measured by proportion independent member in Board of Directors, the proportion of Board of Directors independent, managerial ownership, institutional ownership, audit committee size, education background members of audit committee.

The sample of this study is 87 banks listed in the Indonesian Stock Exchange within the year of 2010 and 2012. The data are drawn from the annual report, multiplregresion is used to analyze the data.

This research find, that Board of Directors size, institutional ownership and education background members of audit committee are significant factors to internal control disclosure.

Keywords : *corporate governance, internal control disclosure*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Corporate governance* direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, dan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit. Adapun pengungkapan pengendalian internal diukur dengan menggunakan indeks yang disusun untuk menentukan tingkat pengungkapan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan perusahaan.

Kelemahan pengawasan dan pengendalian internal dalam kasus yang melibatkan perusahaan Enron, Worldcom, dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para investor dan mengakibatkan menurunnya harga saham di bursa efek berbagai negara seperti Amerika, Eropa, hingga ke Asia.

Skandal akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, Worldcom, dan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen tersebut akhirnya mendorong diterbitkannya Sarbanes-

Oxley Act of 2002 (SOX 2002) (Zhang, J. Zhou dan N. Zhou, 2007). Menurut Femiarti dan Dewayanto (2012) salah satu aspek penting dari SOX adalah terdapat bagian yang berfokus pada isu-isu pengendalian internal terkait dengan pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi. Pengendalian internal merupakan satu komponen penting untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan operasi perusahaan (Jones, 2008).

Di Indonesia penerapan dan pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/2009 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/2003 pasal 2 ayat (2) huruf d dan pasal 13 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 perihal pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum, sehingga perusahaan perbankan wajib menerapkan pengendalian internal dalam kegiatan operasinya dan mengungkapkan pengendalian internal secara menyeluruh.

Ketentuan pengungkapan pengendalian internal pun diperkuat oleh adanya Peraturan Bank Indonesia nomor 14/14/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/35/DPNP tahun 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. Selain itu, pengungkapan informasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diatur berdasarkan keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-431/BL/2012 nomor X.K.6 yang merupakan perubahan atas keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal KEP-431/BL/2006 nomor X.K.6 pasal 2 huruf G nomor 7 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik yang menyatakan bahwa perusahaan harus membuat laporan tahunan yang mengungkapkan implementasi *corporate governance* dan menyampaikan uraian tentang pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit. Ketentuan tentang pengungkapan ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Pengendalian internal perlu mendapat perhatian Bank, mengingat salah satu faktor penyebab terjadinya kegagalan usaha Bank adalah tidak efektifnya pengendalian internal (lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003). Pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan merupakan salah satu pengungkapan yang penting dilakukan karena dapat merefleksikan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Selain itu, menurut Asbaugh-skaife, Collins, dan Kinney (2007) pengungkapan pengendalian internal dapat meningkatkan nilai perusahaan karena dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan yang dapat merugikan investor dan *stakeholders* lainnya.

Di Indonesia beberapa kasus kecurangan yang diindikasikan terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan penerapan *corporate governance* pada perusahaan perbankan di antaranya adalah penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan pegawai Citibank tahun 2011 (sumber: www.vivanews.com), pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia cabang Pangeran Jayakarta dengan total nilai kerugian Rp 3,6 milyar dan melibatkan *account officer* bank tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya salah satu komponen pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian karena melibatkan pihak internal perusahaan dan kelemahan penerapan *corporate governance* nampak dari kurangnya akuntabilitas.

Industri perbankan adalah industri yang berbasis kepercayaan. Untuk meningkatkan kepercayaan investor dan *stakeholder* lainnya bank harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, di antaranya melalui penerapan *corporate governance*, pengendalian internal dan pengungkapan informasi. *Corporate governance* dan pengendalian internal memiliki kaitan yang erat dan menjadi isu bisnis yang penting pada saat ini (Lulian dan

Mihaela, 2012). Menurut Femiarti dan Dewayanto (2012) jika *corporate governance* dan pengendalian internal suatu perusahaan berjalan dengan efektif maka, kecurangan dan *error* dalam kegiatan perusahaan dapat terdeteksi dan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor. Selain itu,

Peran penting dalam penerapan *corporate governance* terletak pada dewan komisaris yang berfungsi mengawasi aktivitas dan kinerja serta menjadi penasihat direksi untuk memastikan bahwa *corporate governance* dilaksanakan dengan baik (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006). Selain itu, menurut Krishnan (2005) kualitas pengendalian internal dalam perusahaan menunjukkan fungsi kualitas lingkungan pengendalian perusahaan termasuk dewan komisaris dan komite audit.

Ukuran dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Jumlah dewan komisaris yang besar dapat memunculkan perpaduan keahlian sehingga dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi yang disampaikan (Suhardjanto dan Dewi, 2011). Penelitian Siagian dan Ghazali (2012) dan Suhardjanto, Dewi, Rahmawati dan Firazonia (2012) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan merupakan mekanisme *corporate governance* yang dalam penelitian ini direpresentasikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hal ini sejalan dengan penelitian Li dan Qi (2008), Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, Jonshon, dan Kim (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi. Sementara itu, penelitian Eng dan Mak (2003) menemukan adanya pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi.

Selain itu, kepemilikan institusional pun dapat mengurangi tindakan *opportunis* manajemen perusahaan melalui pengawasan yang lebih efektif. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik saham institusional dapat meningkatkan pengungkapan informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bogdan, Popa, Pop, dan Farcane (2009) dan penelitian Rouf dan Al-Harun (2011) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi.

Struktur *corporate governance* lain yang mempengaruhi pengungkapan informasi adalah komite audit yang memiliki tugas pokok membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Pembentukan komite audit dilakukan dengan dasar keputusan Badan Pengawas Pasar Modal nomor. 29 tahun 2004 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/2006. Pembentukan tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas pengungkapan informasi, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengungkapan pengendalian internal di antaranya dilakukan oleh Zhou dan Chen (2010) menguji pengaruh *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal di China, menemukan bahwa pengungkapan pengendalian internal berpengaruh positif dengan ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan komite audit, pengungkapan pengendalian internal berpengaruh negatif dengan pemisahan tugas ketua dan manajer umum.

Leng dan Ding (2011) menguji hubungan *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal pada 1309 perusahaan *non-financial* yang terdaftar di Shanghai *Stock Exchange* (SSE) dan di Shenzhen *Stock Exchange* (SZSE) tahun 2010. Penelitian Leng dan Ding (2011) mendapatkan hasil adanya hubungan positif antara pengungkapan pengendalian internal dengan remunerasi dewan komisaris, rangkap jabatan ketua dan manajer umum, tingkat pendidikan komisaris, dan tingkat pendidikan komite audit memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan pengendalian internal, komposisi

kepemilikan negara, tingkat konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan pengungkapan pengendalian internal.

Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal masih relatif sedikit. Salah satu penelitian yang mengaitkan *corporate governance* dengan pengungkapan pengendalian internal di Indonesia dilakukan oleh Waharini dan Dewayanto (2012) yang menguji pengaruh kualitas komite audit, independensi auditor dengan pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada perusahaan yang terdaftar di *New York Stock Exchange*.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang beragam dan penelitian tentang *corporate governance* dan pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia belum banyak dilakukan. Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu adalah objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Pemilihan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian ini karena bank merupakan entitas yang memiliki tingkat risiko yang tinggi sehingga penerapan *corporate governance* dan pengungkapan pengendalian internal yang merefleksikan efektivitas pengendalian internal dalam perusahaan perbankan menjadi sangat penting.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul *Corporate Governance dan Pengungkapan Pengendalian Internal di industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
2. Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?
6. Apakah latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal?

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan kontrak antara satu atau lebih orang (prinsipal) dengan orang lain (agen). Teori ini memberikan pemahaman tentang aktivitas prinsipal dengan memberikan tanggungjawabnya kepada manajemen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan memungkinkan munculnya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer sebagai pengelola perusahaan. Hubungan ini memberikan potensi terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan muncul ketika anggota organisasi memiliki potensi menghasilkan kepentingan pribadi (Demski, 2003).

Agency theory dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu asumsi mengenai manusia, (*people*), organisasi (*organization*), dan informasi (*information*) (Eisenhardt, 1989). Terkait dengan asumsi ini, Arifin (2005) menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*) dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efiseinsi sebagai kriteria produktivitas dan adanya *asymetric information* antara *principal* dan *agent*. Asumsi tentang informasi, bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual belikan. Asumsi-asumsi tersebut menyebabkan berakibat timbulnya asimetri informasi sedangkan asimetri informasi menyebabkan kebutuhan prinsipal akan informasi tidak terpenuhi.

Menurut Healy dan Palepu (2001) terdapat beberapa cara untuk memecahkan masalah asimetri informasi, yaitu: (1) kontrak yang optimal antara manajemen dengan investor, (2) adanya dewan komisaris yang berperan untuk memonitor perilaku manajemen sesuai kepentingan pemilik luar, (3) adanya informasi yang efektif dari pihak perantara, misalnya analis keuangan dan lembaga pemeringkat. Pendapat lainnya disampaikan oleh Brick dan Chindhambaran (2007) bahwa peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh dewan komisaris dan komite-komitanya selain mengurangi terjadinya asimetri informasi juga dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

Ukuran dewan komisaris dan pengungkapan pengendalian internal

Ukuran dewan komisaris terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Dewan komisaris merupakan pemimpin di perusahaan, dan efektivitas dewan komisaris merupakan dasar bagi kesuksesan perusahaan (Seikh, Wang, dan Khan, 2013). Sebagai inti dari *corporate governance*, dewan komisaris bertanggungjawab atas penegakan dan implementasi dari sistem pengendalian internal dan menjamin keandalan pengungkapan informasi (Leng dan Ding, 2011). Dalton *et al.* (1999) menyatakan bahwa ukuran dewan yang optimum lebih efektif dari pada dewan komisaris dalam ukuran kecil. Selain itu, Qu *et al.* (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap transparansi pengungkapan informasi.

Penelitian Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto *et al.* (2012) menemukan adanya pengaruh positif jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi. Sementara itu, hasil penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) tidak konsisten dengan penelitian Siagian dan Ghozali (2012) dan Suhardjanto *et al.* (2012) yang mendapatkan hasil ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi.

Rumusan Hipotesisnya:

H₁: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal

Komposisi komisaris independen dan pengungkapan pengendalian internal

Menurut Peraturan Bank Indonesia No 8/14/2006 komposisi dewan komisaris independen minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris independen yang tidak memiliki pengaruh keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau pengaruh keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (PBI No 8/14/2006). Menurut Leng dan Ding (2011) komisaris independen diharapkan dapat memonitor dan memacu kinerja direktur eksekutif dan manajemen. Komisaris independen bertanggung jawab

untuk membantu meningkatkan kualitas keterbukaan dan meningkatkan transparansi informasi.

Penelitian Suhardjanto dan Permatasari (2010) menyatakan bahwa keberadaan anggota dewan komisaris independen meningkatkan kualitas kontrol perusahaan. Penelitian Y.Sun *et al.* (2012) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan ukuran komisaris independen yang tinggi lebih sering melakukan pengungkapan informasi. Akan tetapi, penelitian Khomsiyah (2005) mendapatkan hasil yang berbeda, tidak terdapat hubungan antara komisaris independen dengan pengungkapan informasi.

Rumusan Hipotesisnya:

H₂ : komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Kepemilikan manajerial dan pengungkapan pengendalian internal

Menurut Eng dan Mak (2003) kepemilikan manajerial merupakan merupakan persentase kepemilikan saham oleh CEO dan komisaris eksekutif. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat menyeleraskan kepentingan pemilik dan agen, sehingga dapat mengurangi masalah agensi. Melalui kepemilikan manajerial maka tindakan oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang dan manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan karena berkaitan dengan kepentingannya sebagai pemilik, sehingga pengungkapan informasi pengendalian internal akan semakin berkualitas.

Hasil penelitian Li dan Qi (2008), Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, Jonshon, dan Kim (2009) yang menunjukkan adanya pengaruh positif kepemilikan manajerial dengan pengungkapan informasi. Sementara itu, hasil penelitian Eng dan Mak (2003) menyimpulkan tidak ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan informasi. Rumusan hipotesisnya:

H₃ : kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Kepemilikan institusional dan pengungkapan pengendalian internal

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial (Ujiyanto dan Pramuka, 2007). Sementara itu, Koh (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan. Para pemegang saham institusional akan berusaha untuk memperbaiki fungsi pengawasan terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir masalah-masalah agensi yang mungkin timbul (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga dengan kepemilikan institusional pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif dan hal tersebut berpengaruh pada luas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bogdan *et al.* (2005), Rouf dan Al-Harun (2011) dan Indriana, Widowati, dan Yulimar (2010) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi. Sementara itu, penelitian Primastuti dan Achmad (2012), Stephens (2008), dan Khomsiyah (2005) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi.

Rumusan hipotesisnya:

H₄ : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Ukuran komite audit dan pengungkapan pengendalian internal

Komite audit sesuai dengan keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. 29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Pembentukan tersebut berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas pengungkapan informasi, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Menurut Myers dan Ziegenfuss (2006) dan Leng dan Ding (2011) sebagai pengawas internal perusahaan, komite audit berhak untuk memantau dewan dan manajemen, mengawasi pembentukan dan implementasi *corporate governance* dan pengendalian internal. Selain itu, Menurut Zhang *et al.* (2007) Ukuran komite audit yang lebih besar akan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal.

Hal ini diungkapkan pula oleh Cormier, Ledoux, Magna, dan Aerts (2009) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan pengungkapan informasi. Selain itu, penelitian Yuen *et al.* (2009) dalam Anyta dan Mutmainah (2011) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berkaitan dengan pengungkapan informasi perusahaan. Penelitian Ho dan Wong (2001) dan Indriana *et al.* (2010) menemukan adanya pengaruh positif signifikan antara keberadaan komite audit terhadap pengungkapan. Hasil yang berbeda didapatkan oleh Khomsiyah (2005), yang menemukan tidak ada hubungan antara ukuran komite audit dengan pengungkapan informasi. Rumusan hipotesisnya:

H₅ : ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dan pengungkapan pengendalian internal

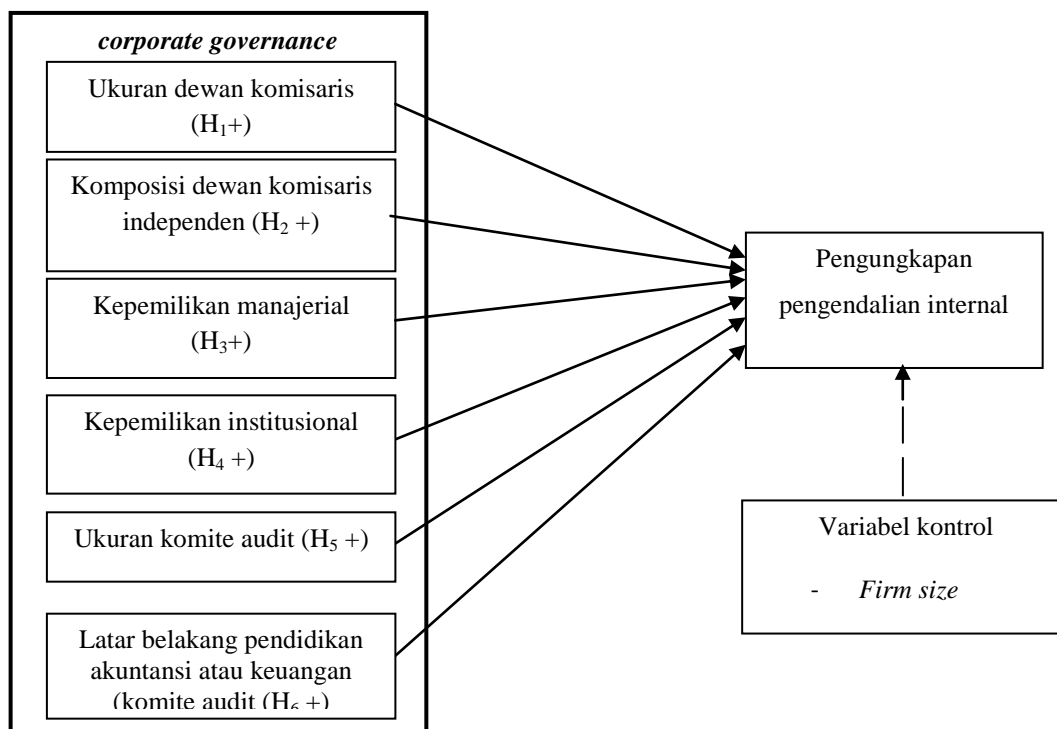
Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit mengacu pada peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa persyaratan keanggotaan komite audit salah satunya adalah memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/2006 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki keahlian akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dapat menunjukkan kompetensi dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Pembanyun dan Januarti (2012) kompetensi komite audit merupakan karakteristik penting untuk menilai efektivitas kinerja komite audit. Komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengendalian internal yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berpengaruh dengan nilai perusahaan.

Penelitian Defond, Hann, dan Hu (2005) komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dapat membantu mewujudkan tujuan *corporate governance*.. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012) dan Waharini dan Dewayanto (2012) menemukan tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit dengan pengungkapan informasi.

Rumusan hipotesisnya:

H₆: latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

SKEMA KONSEPTUAL PENELITIAN



METODE PENELITIAN

Penentuan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Sedangkan sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-2012. Alasan pemilihan perusahaan perbankan dalam penelitian ini karena banyaknya kasus pembobolan bank dan kecurangan dengan nilai kerugian yang material. Hal tersebut diindikasikan terjadi karena lemahnya pengendalian internal dan kurang efektifnya penerapan *corporate governance* pada perusahaan perbankan di Indonesia. Pemilihan periode pengamatan 2010 - 2012 karena kewajiban pengungkapan pengendalian internal dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No 11/25/2009 yang diterapkan secara efektif mulai tahun 2010.

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria – kriteria tersebut adalah:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2012, dan tidak mengalami *delisting*;
2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan dan pengungkapan *corporate governance* dan pengungkapan pengendalian internal; dan
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan dan laporan tahunannya.

Pengukuran Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *corporate governance* sebagai variabel independen dan pengungkapan pengendalian internal sebagai variabel dependen.

Variabel Independen

Variable independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance* yang direpresentasikan dengan :

Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Dalton *et al.* (1999) dalam Suhardjanto *et al.* (2012) ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah total dewan komisaris yang ada di perusahaan (Abeysekera, 2008; Zhang *et al.*, 2007).

$$BS = \sum \text{total dewan komisaris di perusahaan}$$

Komposisi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari pengaruh bisnis atau pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komposisi komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah total dewan komisaris (Abeysekera, 2008; Suhardjanto dan Permatasari, 2010)

$$INDEP = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{total dewan komisaris}}$$

Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah komposisi saham yang dimiliki oleh manajer, termasuk direksi dan komisaris (Jianguo dan Huafang , 2007). Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi (Jianguo dan Huafang, 2007; Eng dan Mak, 2003)

$$MO = \% \text{kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi}$$

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial (Ujjiyanto dan Pramuka, 2007). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan persentase kepemilikan saham oleh investor institusi (Rouf dan Harun, 2011; Koh, 2003)

$$IO = \% \text{kepemilikan saham oleh investor institusi}$$

Ukuran komite audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah keseluruhan anggota komite audit dalam perusahaan (Ho dan Wong, 2001). Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah total komite audit di perusahaan.

$$ACS = \sum \text{total komite audit di perusahaan}$$

Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit

Penelitian Defond, *et al.* (2005) menemukan komite audit dengan keahlian akuntansi atau keuangan dapat memperbaiki *corporate governance* di perusahaan. Keputusan BAPEPAM Nomor Kep- 29/PM/2004 dan peraturan bank Indonesia No 8/14/2006 yang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki keahlian pendidikan akuntansi atau keuangan.

Berdasarkan hal tersebut latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit diukur berdasarkan jumlah anggota komite yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dibandingkan seluruh anggota komite audit (Felo *et al.*, 2005).

$$ACEDU = \frac{\sum \text{anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi /keuangan}}{\sum \text{anggota komite audit}}$$

Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pengungkapan pengendalian internal. Pengungkapan pengendalian internal merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan untuk merefleksikan efektivitas pengendalian internal dalam suatu organisasi (Leng dan Ding, 2011). Pengukuran pengungkapan pengendalian internal diukur menggunakan *dummy*, yaitu dengan memberi nilai 1 untuk setiap item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan, kemudian membagi total item yang diungkapkan dengan nilai maksimum dari seluruh item yang berjumlah 25 (Leng dan Ding, 2011). Item pengungkapan yang disusun mengacu pada lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tanggal 29 September 2009 tentang pedoman standar sistem pengendalian intern bagi bank umum.

$$DISC = \frac{\sum ICD}{\sum MICD}$$

Keterangan :

DISC : pengungkapan pengendalian internal

ICD : Pengungkapan pengendalian internal (skor untuk setiap item informasi pengendalian internal yang diungkapkan dalam laporan tahunan)

MICD : *Maksimum* pengungkapan pengendalian internal (total skor maksimum atas item pengendalian internal yang diungkapkan, 25)

Variabel Kontrol

Ukuran perusahaan (*FIRM SIZE*)

Perusahaan besar lebih mungkin melakukan pengendalian internal untuk pengelolaan sumber daya perusahaan. Doyle, *et al.* (2007) menyatakan bahwa tinggi rendah pertumbuhan perusahaan berpengaruh dengan masalah pengendalian internal. Selain itu, Firth (1979) dalam Jianguo dan Huafang (2007) dan Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa perusahaan besar akan selalu meningkatkan pengungkapan informasinya karena kepatuhan dengan aturan publik. Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total asset (Leng dan Ding, 2011; Koh, 2003).

$$FS = \text{Ln Total Aset}$$

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara

variabel dependen dan independen (Ghozali, 2011 :96). Sebelum dilakukan perhitungan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, maka akan diadakan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan agar memenuhi sifat estimasi regresi yang bersifat BLUES (*Best Linear Unbiased Estimation*). Menurut Ghozali (2011), uji asumsi klasik terdiri dari: (1) uji normalitas; (2) uji multikolinearitas; (3) uji heteroskedastisitas; dan (4) uji autokolerasi. Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$ICDI = \alpha + \beta_1 BS + \beta_2 INDEP + \beta_3 MO + \beta_4 IO + \beta_5 ACS + \beta_6 ACEDU + \beta_7 FSIZE + \varepsilon$$

Keterangan :

SIMBOL	KETERANGAN
α	: konstanta
BS (<i>Board Size</i>)	: Ukuran Dewan Komisaris
INDEP (<i>Independent Commisioner</i>)	: Komposisi Komisaris Independen
MO (<i>Managerial Ownership</i>)	: Kepemilikan manajerial
IO (<i>Institutional Ownership</i>)	: Kepemilikan institusional
ACS (<i>Audit Committee Size</i>)	: Ukuran Komite Audit
ACEDU (<i>Audit Committee Education</i>)	: Latar Belakang Pendidikan Komite Audit
FSIZE	: Ukuran Perusahaan
ε	: <i>error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel.1
Statistik deskriptif

Variable	Minimum	Maximum	Mean
Pengungkapan pengendalian internal (ICD) (%)	0.5200	1.0000	0.799080
Ukuran dewan komisaris (BSIZE)	2.0000	9.0000	4.930000
Komposisi komisaris independen (INDEP) (%)	0.3333	1.0000	0.568053
Kepemilikan manajerial(MO) (%)	0.0000	21.7000	1.605172
Kepemilikan institusional(IO) (%)	11.0300	99.9600	75.753448
Ukuran komite audit(ACSIZE)	2.0000	7.0000	3.830000
Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit(ACEDU) (%)	0.1667	1.0000	0.560066
Ukuran Perusahaan(Fsize)	26.0600	34.5900	30.9657

Berdasarkan pengujian empiris yang dilakukan diperoleh informasi statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, nilai maksimum dan nilai rata-rata (*mean*). Statistik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan bahwa pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia memiliki nilai rata-rata 79.91% dari poin keseluruhan 25 poin. Hal ini menunjukkan tingkat pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia sudah cukup baik karena nilai rata-rata memperoleh skor lebih dari setengah poin maksimal penelitian.

Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris (BSIZE) sebesar 4.93 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan perbankan di Indonesia telah memenuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu memiliki dewan komisaris minimal 3 orang. Hal ini terlihat dari hasil

pengamatan 87 sampel perusahaan perbankan selama tahun 2010 sampai tahun 2012, 69 perusahaan perbankan telah memiliki dewan komisaris lebih dari 3 orang, 14 perusahaan memiliki dewan komisaris sesuai ketentuan minimal Bank Indonesia, dan 4 perusahaan hanya memiliki 2 dewan komisaris.

Komposisi dewan komisaris independen (INDEP) menunjukkan nilai rata-rata 56.81%. Hal ini berarti 56.81% anggota dewan komisaris merupakan komisaris independen. Persentase terendah anggota dewan komisaris independen adalah 33.33% pada Bank Mayapada Internasional tahun 2010, Bank Victoria Internasional dan Bank Windu Kentjana tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 memiliki nilai di atas 33.33%. Sementara itu, persentase komisaris independen tertinggi bernilai 100%, yaitu Bank Kesawan tahun 2010 dan Bank ICB Bumiputera tahun 2012.

Nilai rata-rata anggota komisaris independen yang mencapai 56.81 % menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris independen telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang penerapan *good corporate governance* yang mewajibkan perbankan memiliki komisaris independen minimal 50% dari jumlah dewan komisaris. Meski demikian, hal ini pun dapat mengindikasikan bahwa dalam menetapkan jumlah anggota dewan komisaris independen, perusahaan hanya mempertimbangkan untuk memenuhi syarat Peraturan Bank Indonesia.

Rata-rata kepemilikan manajerial di perusahaan perbankan sebesar 1,61%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kepemilikan manajerial dalam perusahaan cukup rendah. Adapun persentase terendah kepemilikan manajerial dalam perusahaan perbankan adalah 0 % yang berarti tidak ada komisaris dan/atau direksi yang memiliki saham di perusahaan. Sedangkan persentase kepemilikan manajerial tertinggi selama periode 2010 sampai dengan 2012 adalah 21,70%, yaitu Bank Capital Indonesia tahun 2011. Rendahnya tingkat kepemilikan manajerial pada perusahaan perbankan di Indonesia karena di Indonesia kepemilikan saham dalam perusahaan cenderung terkonsentrasi oleh kepemilikan keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata kepemilikan institusional adalah sebesar 75.76%. Hal ini dapat terlihat dari 87 perusahaan yang menjadi sampel, terdapat 48 perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan institusional lebih dari nilai rata-rata. Persentase kepemilikan institusional tertinggi adalah sebesar 99.96%, yaitu pada Bank Ekonomi Raharja tahun 2010. Persentase terendah kepemilikan institusional sebesar 11.03% pada Bank Himpunan Saudara tahun 2010.

Sementara itu rata-rata ukuran komite audit pada perusahaan yang menjadi sampel adalah 3.83%, yang diukur dengan banyaknya anggota komite audit dalam perusahaan. Nilai terendah ukuran komite audit pada perusahaan sampel adalah 2, pada Bank Kesawan tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi ukuran komite audit terdapat pada Bank CIMB Niaga tahun 2010 sebesar 7 orang. Rata-rata ukuran komite audit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan perbankan telah memenuhi ketentuan Bapepam tentang jumlah minimal anggota komite audit yaitu sebanyak 3 orang.

Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 56.01%. Persentase tertinggi latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan komite audit adalah sebesar 100% pada Bank Central Asia, Bank Mutiara, Bank Mega, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional tahun 2010. Tahun 2011 pada Bank Danamon Indonesia, Bank Artha Graha Internasional, Bank Pan Indonesia, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten. Sedangkan pada tahun 2012 perusahaan yang memiliki persentase tertinggi adalah Bank Bukopin, Bank Pan Indonesia, Bank Ekonomi Raharja, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Sementara itu, persentase

terendah latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan komite audit adalah sebesar 16.67%, yaitu pada Bank Rakyat Indonesia tahun 2010 dan Bank Mandiri tahun 2012.

Rata-rata latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit, menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 yang mewajibkan minimal 1 orang anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Selain itu, hal ini mengindikasikan keseriusan dewan komisaris untuk memilih dan menetapkan anggota komite audit yang kompeten, diharapkan melalui kompetensi yang dimiliki komite audit dapat meningkatkan efektivitas kinerja komite audit.

Firm size (ukuran perusahaan) yang diukur melalui logaritma natural total asset menunjukkan nilai rata-rata 30.97%. Nilai terendah *firm size* perusahaan adalah 26.06%, yaitu Bank Swadesi tahun 2011. Sedangkan nilai *firm size* tertinggi sebesar 34.59 % adalah Bank Rakyat Indonesia tahun 2012.

Tabel. 2
Asumsi Klasik

<u>Variable</u>		<u>Pengujian Asumsi</u>	<u>Hasil</u>
BFSIZE	VIF= 1.770	Multikolinearitas	VIF<10 Tidak terjadi multikolinearitas
INDEP	VIF= 1.067	Multikolinearitas	
MO	VIF= 1.192	Multikolinearitas	
IO	VIF= 1.180	Multikolinearitas	
ACSIZE	VIF= 1.577	Multikolinearitas	
ACEDU	VIF= 1.038	Multikolinearitas	
FIRM SIZE	VIF= 1.632	Multikolinearitas	
<i>Run test sig.</i>	0.161 > 0.05(sig)	Autokorelasi	ρ -value>5% Tidak terjadi autokorelasi
<i>One Sampke K-S S_Asym. Sig.</i>	0.677 > 0.05(sig)	Normalitas	ρ -value>5% data berdistribusi normal
BFSIZE	0.854(sig)	Heteroskedastisitas	ρ -value>5% Tidak terjadi heteroskedastisitas
INDEP	0.944(sig)	Heteroskedastisitas	
MO	0.957(sig)	Heteroskedastisitas	
IO	0.835(sig)	Heteroskedastisitas	
ACSIZE	0.614(sig)	Heteroskedastisitas	
ACEDU	0,170(sig)	Heteroskedastisitas	
<i>FIRM SIZE</i>	0.802(sig)	Heteroskedastisitas	

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*). Menurut Gujarati (2006) analisis regresi berganda (*multiple regression*) pengujian validitas data dilakukan sebagai syarat analisa regresi berganda agar penaksiran parameter dan koefisien regresi valid, tidak bias dan konsisten. berdasarkan pengujian asumsi klasik dengan menggunakan kolmogorov-smirnov, uji runs test, uji glejser dan VIF pada tabel 2 diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan valid.

Hasil Pengujian dan Pembahasan

Tabel. 3

<u>Variabel</u>	<u>Coefficient</u>	<u>P-value</u>
<i>Konstanta</i>	0.743	
<i>BFSIZE</i>	0.021	0.01***)
<i>INDEP</i>	0.053	0.945
<i>MO</i>	- 0.112	0,855

<i>IO</i>	- 0.001	0.003**)
<i>ACSIZE</i>	- 0.118	0.709
<i>ACEDU</i>	0.106	0,013**)
<i>FIRM SIZE</i>	0.127	0.677
<i>Adjusted R Square</i>	0,193	
<i>F-statistic</i>	7,873	
Prob (<i>F-statistic</i>)	0,000	

Tingkat signifikasi: ***) 0,01; **) 0,05; *) 0,1

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal sebagai berikut:

$$DISC = 0.743 + 0.021 BSIZE + 0.053 INDEP - 0.112 MO - 0.001 IO - 0.118 ACSIZE + 0.106 ACEDU + 0.127 FSIZE + e$$

Berdasarkan tabel 3, bahwa koefisien determinasi ($adj.R^2$) model persamaan regresi sebesar 0,193 atau 19,3%. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen, sebesar 19,3%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam model penelitian tersebut. Nilai probabilita (*F-statistic*) adalah 0,000 atau $\rho < 0,005$. Hal ini berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Hipotesis 1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris (*BSIZE*) terhadap pengungkapan pengendalian internal (*DISC*). Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 2 terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 3.643 dengan ρ -value $0.001 < 5\%$. Ini berarti ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia, atau dengan kata lain hipotesis penelitian diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Siagian dan Ghazali (2012) dan Suhardjanto *et al.* (2012). Hasil penelitian yang menunjukkan koefisien positif ini berarti bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris akan berpengaruh pada makin tingginya pengungkapan informasi tentang pengendalian internal perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Dalton *et al.* (1999) bahwa ukuran dewan yang optimum lebih efektif dari pada dewan komisaris dalam ukuran kecil.

Hipotesis 2: Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 0.058 dengan ρ -value $0.945 > 5\%$. Ini menunjukkan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal, atau dengan kata lain hipotesis ditolak.

Hasil penelitian yang menunjukkan arah positif tidak signifikan ini berarti bahwa dengan penambahan jumlah anggota komisaris independen searah dengan meningkatkan pengungkapan pengendalian internal, namun demikian penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa variabel komposisi komisaris independen merupakan variabel yang relevan untuk meningkatkan pengungkapan informasi tentang pengendalian internal. Hasil penelitian yang

tidak signifikan ini didukung oleh penelitian Khomsiyah (2005), Eng dan Mak (2003), dan Ho dan Wong (2001).

Hasil penelitian ini mengindikasikan belum efektifnya peran pengawasan komisaris independen. Menurut Hasil Survei Asian Development Bank (2004) kuatnya kendali pemegang saham mayoritas dan pendiri perusahaan menyebabkan berkurangnya independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan.

Hipotesis 3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat pengungkapan pengendalian internal. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -0.117 dengan ρ -value $0.855 < 5\%$. Dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak, karena kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Eng dan Mak (2003) dan Ruland et al. (1990) yang mendapatkan hasil semakin rendah kepemilikan manajerial dapat meningkatkan pengungkapan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), dan Fama dan Jensen (1983) hal ini terjadi karena tindakan *opportunis* manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi sehingga manajemen cenderung tidak mengungkapkan informasi perusahaan.

Hipotesis 4: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -3.034 dengan ρ -value $0.003 < 5\%$. Ini berarti kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan perbankan di Indonesia, atau dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Bogdan (2005), Rouf dan Al-Harun (2011), Mitra dan Hosain (2010) dan Indriana et al. (2010) mendapatkan hasil adanya pengaruh positif antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan informasi.

Hasil pengujian yang mendapatkan hasil koefisien negatif berarti semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan maka pengungkapan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan semakin rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh Collet dan Dedman (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi. Menurut Collet dan Dedman (2010) hal ini terjadi karena investor institusi tidak optimal menggunakan haknya untuk mengawasi manajemen. Selain itu, hal ini diindikasikan terjadi karena karakteristik struktur kepemilikan di Indonesia yang terkonsentrasi pada kepemilikan keluarga (Lukviarman, 2004).

Hipotesis 5: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Hipotesis penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar -0.114 dengan ρ -value $0.709 > 5\%$. Ini berarti ukuran komite audit menunjukkan arah yang bertentangan dengan dugaan peneliti dan menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, atau dengan kata lain hipotesis penelitian ditolak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ho dan Wong (2001), dan Indriana et al. (2010).

Ukuran komite audit dalam penelitian ini merupakan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak

mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Khomsiyah (2005) yang mendapatkan hasil ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi perusahaan.

Hipotesis 6: Latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal

Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia. Dari hasil regresi yang disajikan pada tabel 4.6, terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,540 dengan ρ -value $0.013 < 5\%$. Ini berarti latar belakang pendidikan komite audit yang dalam penelitian ini diukur dengan perbandingan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dengan jumlah anggota komite audit perusahaan, berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal atau dengan kata lain hipotesis penelitian diterima.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Femiarti dan Dewayanto (2012) dan Waharini dan Dewayanto (2012) yang tidak berhasil membuktikan pengaruh latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal perusahaan.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan. Dari hasil regresi yang disajikan dalam tabel 3 terlihat bahwa nilai t hitung sebesar 0,118 dengan ρ -value $0.677 > 5\%$. Hal ini berarti ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Karakteristik data yang nampak melalui hasil statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan pengendalian internal perusahaan perbankan di Indonesia sudah cukup baik. Perusahaan mengungkap rata-rata 79.71% yang berarti lebih dari setengah indeks pengungkapan penelitian ini. Ini dapat terjadi karena tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengungkapan informasi tentang pengendalian internal. Disamping itu, manfaat pengungkapan pengendalian internal telah dipahami, sehingga pengungkapan informasi ini dirasakan sebagai kebutuhan.

Berdasarkan pengujian regresi, diperoleh simpulan bahwa:

- Komposisi komisaris independen (INDEP), kepemilikan manajerial (MO), dan ukuran komite audit (ACSIZE) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. ini berarti ketiga proksi tersebut bukan merupakan proksi yang relevan untuk menjelaskan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal.
- Ukuran dewan komisaris (BSIZE), kepemilikan institusional (IO), dan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit (ACEDU) terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal di Indonesia. Hasil penelitian ini berarti bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit merupakan representasi yang relevan untuk menjelaskan pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengungkapan pengendalian internal yang masih sangat terbatas di Indonesia serta menjelaskan peran *corporate governance* dalam proses pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Disamping itu penelitian ini juga telah

mengidentifikasi proksi dan *measurement* baru yang relevan untuk menjelaskan *corporate governance* terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Saran

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya Bank Indonesia sebagai regulator meninjau kembali kriteria independensi dewan komisaris.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki melalui penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu:

1. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama tiga tahun yaitu tahun 2010-2012. Penelitian serupa di masa yang akan datang diharapkan dapat memperluas periode pengamatan. Ini diperlukan agar hasil penelitian dapat diuji konsistensi dan generalisasinya.
2. Penambahan dan perubahan proksi masih dapat dimungkinkan dalam pengembangan penelitian ini, misalnya jumlah pertemuan dewan komisaris, karena lampiran Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/22/DPNP tahun 2003 menyatakan bahwa dewan komisaris harus membahas efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan minimal satu kali pertemuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S N. 2004. Board composition, ceo duality and performance among Malaysian listed companies. *Corporate governance*. 4 (4): 47 – 61.
- Abdul Rahman, R dan Mohamed Ali, F.H. 2006. Board, Audit Committee, culture and earnings management: Malaysia evidence. *Managerial Auditing Journal*. 21; 783-804.
- Abraham , S dan Cox, P. 2007. Analysis the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. *The British Accounting review*. 39(3): 227 – 248.
- Abdul Ghafar N A (2008), “Association Between Audit Committee Members and Board of Directors’ Human Capital Features and Underpricing Among Malaysian IPOs”, Unpublished Master Dissertation at Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia.
- Andayani, W., Atmini, S dan Mwangi, JK. 2008. Corporate Social Responsibility, good governance and the intellectual property: An external strategy of the management to increase the company’s value. National confrence on management research.
- Amran, A; Rosli, A; Hassan, M, 2009. Risk reporting : An exploratory study on risk management disclosure in Malaysian annual reports. *Managerial Auditing Journal* 24 (1): 39-57 .
- Akhtaruddin, M. (2005). Corporate disclosure practices in Bangladesh. *The International Journal of Accounting* 40, 399-422. <http://dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2005.09.007>.
- Barako, D. 2007. Determinant of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. *African journal of business management*. 1(5): 113 – 128.
- Bassel Committee on Banking Supervision. 2013. *Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*.
- _____.1999. *Enhancing Good Corporate Governance in Banking Organization*.
- Byard, D, Li, Y and Weintrop, J. 2006. Corporate Governance and the quality of financial analysts information, *Journal of Accounting and Public Policy*. 25. 609-625

- Carter, D.A., D'Souza, F., Simkins, B. J., and Simpson, W.G. 2010. The gender and ethnic diversity of US boards and boards committees and firm financial performance. *Corporate Governance: An international Review*, 18(5), 396-414.
- Che Haat, M H, Rahman dan Mahenthiran S .2008. Corporate governance, transparency and performance of Malaysiaian companies. *Managerial Auditing journal*. 23(8): 744 – 778.
- Dionne, G dan Triki, T. 2005. Risk management and corporate governance : the important of independence and financial knowledge for the board and the audit committee. *HEC Montreal working paper* No. 05-03.working paper (diakses tanggal 20 juli 2011)
- Dobler, M; Lajili, K; dan Zeghal, D. 2011. Attributes of corporate risk disclosure: an international investigation in the manufacturing sector. *Journal of international accounting research*. 10(2) 1 – 22.
- Deegan, C and Rankin, M. 1997 The materiality of enviromental information theory to users of annual report, *Accounting, auditing and accountability Journal*. 15(3); 282-312.
- Deumes, R. 2008. Corporate risk reporting. *Journal of Business communication*. 45 (2): 120 – 157.
- Eng, L.L and Mak, Y.T. 2003. Corporate Governance and voluntary disclosure. *Journal of accounting and public policy*. 22: 325 – 345.
- Florackis, C and Ozkan, A.2004. Agency cost and corporate governance mechanisms: Evidence for UK firms, viewed 18 Mei 2008.
- Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI). 2001. Seri tata kelola perusahaan (corporate governance) jilid II. Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (tata kelola perusahaan).
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi analisis multivariate SPSS. BP Undip
- Guner, AB, Malmendier, U and Tate G. 2008. Financial expertise of directors. *Journal of financial economics*. 88: 109 – 125.
- Guest, P.2008. The determinant of board size and composition: evidence from the UK. *Journal of corporate finance*. 14. 51-72.
- Gordon, L. A., Loeb, M. P., & Sohail, T. (2010). Market Value of Voluntary Disclosures Concerning Information Security. *MIS Quarterly*, 34(3), 567-594.
- Greenwood R, Diaz AM, Li SX, Lorente JC. 2010. The Multiplicity of Institutional Logics and the Heterogeneity of Organizational Responses. *Organization Science*. 21 521-539.
- Harrisson, J. R. 1987. The strategic use of corporate board commitees. *California management review*. 30 (1): 109 – 125.
- Herwidayatmo. 2000. Implementasi good corporate governance untuk perusahaan publik Indonesia. *Majalah usahawan* 10(29): 25 – 32.
- Ho, SS dan Wong, K.S. 2001. A Study of the realtionship between corporate governance structure and the extend of voluntary disclosure. *The journal of international accounting, auditing and taxation* 10: 139-156.
- Haniffa, RM and Cooke, TE. 2002. Culture, corporate governance and disclosure in Malasian corporation. *ABACUS*. 38(3): 317 – 349.
- Htay, S; Rashid, H; Adnan, M; Meera, A. 2011. Corporate governance and risk management informastion disclosure in Malaysia listed banks: panel data analysis. *International review business research papers*. 7 (4): 159 – 176.

- Horing, D; Grundl, H. 2011. Investigating risk disclosure practice in the european insurance industry. *The Geneva papers on risk and insurance – issues and practice*. 36. 380 – 413.
- Hock ng, Tuan; Chong Lee, Lee dan Ismail, H. 2012. Is the Risk Management Committee only a procedural compliance ?. *The Journal of Risk*. 14(1) 71-86.
- Hutton, A.2004. Beyond financial reporting: An integrated approach to disclosure..*Journal of Applied corporate finance*, 16 (4): 8 – 16.
- Ismail, R; Rahman, R. 2011. Institusional investors and board of directors monitoring role on risk management disclosure level in Malaysia. *The IUP journal of corporate governance*. X (2): 37-61
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm. Manajerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 82-136.
- Jensen, M. C. 1986. Agency cost of free cash flow, corporate finance and takeovers. *American Economics Review*, 76 (2), 323-329.
- Jiraporn, P. Singh, M and Lee, C,I. 2009. Inefective corporate governance: director busyness and board committee membership. *Journal of Banking and finance* . 33(5): 819 - 828
- Klien, A. 1998. Affiliated directors: puppets of management or effective director. Diakses tanggal 22 Juni 2010 (www.w4.sternnyu.edu).
- Khomsiyah. 2003. Hubungan coporate governance dan pengungkapan informasi: Pengujian simultan. Prosiding SNA VI.
- Karamanou, I and N. Vafeas. The association between corporate boards, audit commitees and management earnings forecast: an empirical analysis. *Journal of Accounting research*. 43(3): 453-486.
- KPMG.2006. How do Boards Approach Risk Management, *KPMG*
- Lajili, K; Zeghal, D.2005. A content analysis of risk management disclosure in canadian annual reports. *Canadian journal of administrasi science*. 22 (2), 125 – 142.
- Lakhal, F .2005. Voluntary Earnings disclosure and corporate governance: Evidence form France, *Review of Accounting & Finance* . 4(3). 64-85.
- Linsley, P and Shrives, P. 2005. Tranparancy and the disclosure of risk information in banking sector. *Journal of financial regulation and complience*. 13(3); 205 – 214.
- Lipton, M and Lorsch, J.W.1992. A modest proposal for improved corporate governance. *Business lawyer*. 46(1): 551 – 589.
- Lin, J.W., Li, J.F and Yang, J.S.2006. The effect aof Audit Committee performance on earning quality. *Managerial Auditing Journal*. 12; 921-933.
- Liu, M.H.C and Zhuang, Z.2011. Management earnings forecast and the quality of analysts forecast: the moderating effect of audit committees. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 7: 31-45.
- Lukviarman Niki. 2005. Persepektif Shareholding versus Stakeholding di dalam memahami fenomena Corporate Governance. *Jurnal Siasat Bisnis* No. 10 Vol. 2, Desember 2005
- Oorschot, L. 2009. Risk reporting: an analysis of the German banking industry. <http://oathesis.eur.nl>. (Diakses tanggal 06 Juni 2011).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/8/PBI/2003. Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006. *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum*.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/2006. Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/2006. Tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum .
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/25/PBI/2009. Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
- Raber, R W. 2003. The role of good corporate governance in overseeing risk. *Corporate Governance advisor*. 11 (2). 11- 16.
- Rudjito.2004. Kegunaan penerapan risk management untuk perbankan. *Jurnal hukum bisnis*.Vol 23 No.3
- Reeb, D M and Zhao. W. 2009. Director capital and corporate disclosure quality. Diakses tanggal 17 september 2011 .
- Siahaan Hinsa. 2009. Manajemen Risiko: Pada Pada Perusahaan dan Birokrasi. *Elex Media Komputindo – Jakarta*.
- Santomero, MA. 2007. *Commercial bank risk management: an Analysis of the process*, diakses tanggal 11 februari 2011. (www.fic.wharton.upenn.edu).
- Subramaniam, N Mc Manus, L and Zhang, J. 2009. Corporate governance, firm characteristic and risk management committee formation in Australia companies. *Managerial auditing journal*. 24 (4): 316 – 339.
- Suhardjanto dan Dewi. 2011. Pengungkapan risiko finansial dan tata kelola perusahaan: studi empiris perbankan Indonesia. *Jurnal keuangan dan perbankan*. 15(1); 105 – 118
- Suhardjanto dan Permatasari.2010. Pengaruh Corporate Governance, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan terhadap Enviromental Disclosure: Studi Empiris pada perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi KINERJA*. Vol 14, No.2 Agustus 2010.
- Setyaningsih dan Atahau. 2007. Identifikasi praktik penyimpangan risiko dan implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan. *Fokus Ekonomi* (Desember): 162-187.
- Siagian, Siregar dan Rahadian. 2013. Corporate Governance, Disclosure Quality, Ownership Structure and Firm Value. staff.ui.ac.id/internal/060603583/.../19110.pdf
- Tarmizi, A.2012. Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship ?. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16(1) 1-12.
- Vandemele, S., Vergauwen, P. and Michiels, A. (2009), “Management risk reportin practices andtheir determinants: a study of Belgian listed firms”, available at: <https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bitstream/1942/9392/2/CorporateriskB.pdf>
- Walker, D. 2009. A review of corporate governance in UK banks ather financial industry entities: financial recommendation. Diakses tanggal 10 Agustus 2010 (www.hm-treasury.gov.uk)
- Warsono, S., Amalia. F., Rahajeng. DK. 2009. *Corporate Governace: concept and model*, Center for Good Corporate Governance FE UGM.
- Xie, Biao; Davidson, W; DaDalt, P. 2003. Earnings management and corporate governance : the role of the board and the audit committee. *working paper* (diakses tanggal 20 juli 2011)
- Yatim, P. 2010. Board Structure and the establishment of a risk management committee by Malasian listed firms. *Journal of management and governance*. 14 (3). 296 – 314.
- Zadeh, F; Eskandari, A. 2012. Firms Size as Company’s characteristic and level of risk disclosure: review on theories and literatures. *International journal of Business and social science*. 03 (17); 9 – 17

www.tempo.co.id

www.suarapembaruan.com